



Asesmen Kinerja Pemerintah dan Perekonomian Daerah Provinsi Papua terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pasca Covid-19

Tia Ayu Agusta^{1*}, Handy Nugraha²,

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*Korespondensi: b300210039@student.ums.ac.id

Info Artikel

Diterima 13
Maret 2025

Disetujui 26
Juli 2025

Dipublikasikan 25
Agustus 2025

Keywords:
IPM, PDRB,
Pengeluaran
Pemerintah, dan
UMK

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang hingga kini masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua tercatat masih berada di bawah rata-rata nasional, yang mengindikasikan rendahnya capaian dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Untuk mendorong peningkatan IPM, dibutuhkan berbagai faktor pendukung seperti pengeluaran pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis bagaimana IPM Papua dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan, serta kontribusi PDRB dan UMK. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menerapkan metode analisis regresi data panel. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder sembilan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam periode 2020 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel PDRB yang memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui PDRB mampu memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Sementara itu, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta UMK tidak memberikan pengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan perlunya evaluasi efektivitas alokasi anggaran pemerintah dan kebijakan ketenagakerjaan agar benar-benar dapat mendorong pembangunan manusia di Papua secara berkelanjutan.

Abstract

Papua is one of the provinces in Indonesia that continues to face major challenges in human development. The Human Development Index (HDI) of Papua remains below the national average, indicating low achievements in education, health, and living standards. To improve the HDI, several supporting factors are needed, such as government expenditure, Gross Regional Domestic Product (GRDP), and District/City Minimum Wage (UMK), which serve as instruments for economic development and community welfare. This study specifically aims to analyze how Papua's HDI is influenced by government expenditure in the sectors of education, health, and road infrastructure, as well as the contributions of GRDP and UMK. Using a quantitative approach, this research applies a panel data regression analysis method. The data used are secondary data collected from nine districts and cities in Papua Province covering the period from 2020 to 2023. The results of the study show that only GRDP has a significant effect on the HDI. This finding indicates that economic growth, as reflected in GRDP, has

a real impact on improving the quality of life in Papua. Meanwhile, government expenditure on education, health, and infrastructure, as well as UMK, does not have a significant effect. These results suggest the need to evaluate the effectiveness of government budget allocation and labor policies so they can better contribute to sustainable human development in Papua.

1. Pendahuluan

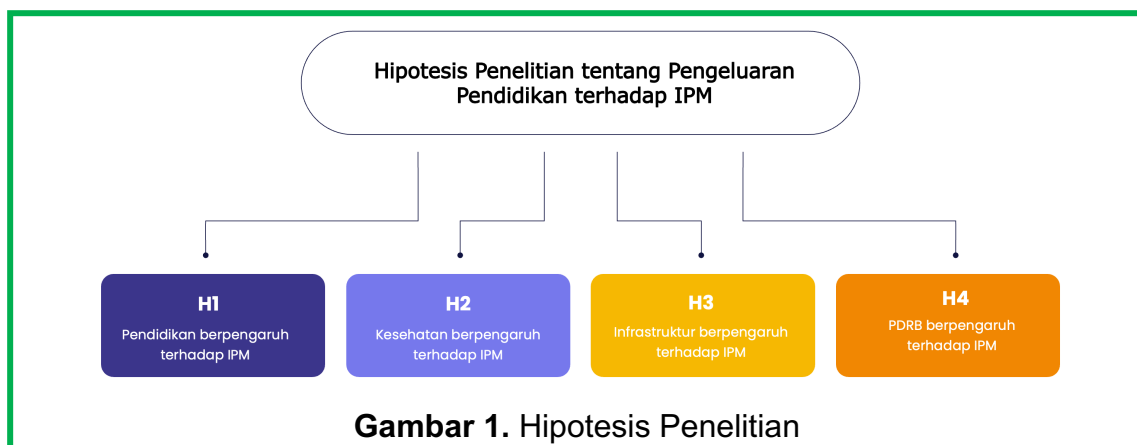
Peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pertumbuhan ekonomi ialah satu hal yang krusial untuk negara berkembang (Zarkasi et al., 2021). Salah satu negara berkembang yang sering menghadapi tantangan pembangunan untuk membangun masyarakat yang makmur dan sejahtera adalah Indonesia (Maulina & Andriyani, 2020). Adanya peningkatan ekonomi yang tinggi tidak selalu memecahkan masalah kesejahteraan masyarakat (Si'lang et al., 2019). Pada dasarnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki nilai GDP tertinggi di Asia Tenggara, hal ini didukung karena adanya populasi penduduk yang besar dan banyaknya sumber daya alam. Berdasarkan data dari The World Bank (2023), bahwa Indonesia memiliki populasi penduduk kisaran 277,53 juta jiwa dan berada pada peringkat ke-4 hal ini didukung data dari Countrymeter (2023). Meskipun GDP Indonesia menempati peringkat teratas di Asia Tenggara, hal ini tidak sejalan dengan pembangunan manusia yang terbilang masih rendah. Kemajuan demografi suatu negara dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (Vitona et al., 2024).

Publikasi *Human Development Report* tahun 1996, *United Nations Development Programme* (UNDP) pertama kali mengemukakan IPM sebagai “a process of enlarging people’s choices” atau meningkatkan bagian dari kehidupan masyarakat. Menurut *United Nations Development* (UNDP) score HDI Indonesia memperoleh nilai 71,3 yang menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan IPM yang tinggi. Namun, score IPM Indonesia masih berada di peringkat ke-6 di ASEAN dan peringkat 112 dari 193 negara. Tujuan pemeringkatan melalui Indeks Pembangunan Manusia adalah memberi gambaran tentang kualitas kehidupan manusia baik sosial, ekonomi, dan budaya (Sitompul et al., 2024). Walaupun Indonesia memiliki potensi yang besar namun, kualitas hidup masyarakat masih rendah dan belum merata. Menurut data BPS (2024), lima provinsi di Indonesia seperti: Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah memiliki Indeks Pembangunan Manusia terendah. Banyak daerah di Indonesia memiliki IPM kurang dari rata-rata nasional, yang berarti menjelaskan adanya ketidaksamaan kualitas hidup masyarakat (Dendy Indramawan et al., 2021).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi bagian dari parameter yang dipergunakan sebagai penilaian pembangunan manusia dalam jangka panjang (Sidabutar et al., 2020). IPM memiliki peranan penting untuk menentukan tingkat pembangunan ekonomi yang dikaitkan dengan tingkat pembangunan manusia suatu negara (Agustin & Anto, 2022). Pembangunan manusia juga merupakan sebuah investasi di masa depan (Arifin, 2023). Tujuannya adalah agar manusia dapat hidup lebih lama dalam lingkungan yang lebih baik (Harahap, 2022). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi fokus utama pemerintah Indonesia, karena IPM sebagai faktor krusial dalam kemajuan dan kualitas hidup masyarakat (Agustin & Anto, 2022). Peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia

terlihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan, di mana semakin besar anggaran yang dikeluarkan, semakin tinggi pula tingkat pembangunan manusia yang tercapai (Bakar, 2020).

Peningkatan akses pendidikan berdampak penting pada IPM di seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Papua, hal tersebut karena pendidikan mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesehatan, kualitas pendidikan yang baik berpengaruh langsung terhadap peningkatan IPM di Papua. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia memerlukan penyediaan sarana memadai, melalui investasi di sektor pendidikan sebagai langkah utama (Batubara, 2023). Investasi di bidang pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan, literasi, dan keterampilan masyarakat, yang selanjutnya akan berdampak positif pada IPM (Harsono et al., 2024). Hal tersebut didukung oleh penelitian Listianingsih et al., (2022) dan Imron, (2018) bahwasannya biaya pendidikan berdampak pada IPM. Karena pendidikan pada dasarnya berfungsi sebagai landasan ekonomi untuk pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas.



Berdasarkan kajian literatur, hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa terdapat empat variabel utama yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua. Pertama, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan (H1) diperkirakan berpengaruh terhadap IPM karena pendidikan yang baik dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pendapatan Masyarakat (Abdilah & Suliswanto, 2021; Rahim, 2021; Susanti, 2020; Maryozi et al., 2022; Safitri 2016). Kedua, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (H2) dihipotesiskan berpengaruh signifikan terhadap IPM sebab kesehatan yang memadai merupakan fondasi utama produktivitas serta peningkatan kualitas hidup manusia (Wulandari, 2022; Munawaroh, 2020; Thazafi, 2022; Putra, 2017). Ketiga, pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan (H3) berpengaruh terhadap IPM karena mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, dan kegiatan ekonomi yang sebelumnya terbatas (Kiha et al., 2021; Naibaho & Nabila, 2021; Larasati, 2018; Suhedi & Astuti, 2023). Keempat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (H4) diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap IPM karena peningkatan pendapatan daerah dapat memperbesar daya beli masyarakat, memperkuat perekonomian, dan menciptakan lapangan kerja baru (Ismanti, 2017; Komang & Ida, 2024; Jahang et al., 2024; Imelda et al., 2021). Dengan demikian, variabel pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan PDRB dirumuskan sebagai faktor yang menjadi dasar hipotesis penelitian terkait peningkatan IPM di Provinsi Papua.

2. Metode Penelitian

Data sekunder yang digunakan pada studi ini diambil dari 9 Kabupaten dan Kota yang terletak di Provinsi Papua dengan observasi mulai tahun 2020 sampai 2023. Data tersebut dipublikasikan oleh situs resmi milik pemerintah Indonesia dan situs berita domestik. Secara lebih rinci, sumber data untuk variabel IPM dan PDRB di peroleh melalui website BPS www.bps.go.id, data pengeluaran pemerintah diperoleh dari situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia www.kemenkeu.go.id, dan data Upah Minimum Kabupaten (UMK) diperoleh dari situs yang memberikan informasi seputar keuangan dan perbankan melalui www.blitarkota.net.

IPM didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia sebagai tolok ukur kemampuan dasar pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama: tingkat pendidikan, kesehatan, serta standar hidup layak. Satuan data IPM dalam studi ini adalah basis poin. Kementerian keuangan mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah berasal dari pendapatan APBN yang diberikan pada daerah-daerah dengan presentase tertentu untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pengeluaran pemerintah untuk studi ini adalah ribu rupiah per unit data. Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto adalah ukuran pendapatan suatu wilayah yang dapat berguna untuk mengevaluasi hasil pembangunan dan sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi di daerah tertentu. Satuan data PDRB dalam penelitian ini yaitu juta rupiah. Upah, menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ialah hak pekerja atau buruh yang diserahkan oleh pengusaha atau pemberi pekerjaan yang ditentukan atau dibayarkan menurut perjanjian kerja yang disepakati serta, berdasar pada peraturan hukum. Satuan data UMK dalam studi ini adalah rupiah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Papua dengan periode observasi dari tahun 2020 hingga 2023. Data penelitian bersumber dari beberapa lembaga resmi, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyediakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempublikasikan data pengeluaran pemerintah, dan informasi mengenai Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang diperoleh dari situs keuangan dan perbankan. IPM yang dirilis oleh BPS digunakan sebagai indikator kemampuan dasar pembangunan manusia melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak dengan satuan data dalam basis poin. PDRB dipakai sebagai ukuran pendapatan suatu wilayah dengan satuan juta rupiah, sedangkan pengeluaran pemerintah diukur dalam ribu rupiah per unit data, yang mencakup alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, data UMK dalam penelitian ini menggunakan satuan rupiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Semua data tersebut dihimpun secara sistematis untuk kemudian dianalisis menggunakan metode regresi data panel agar dapat menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Papua.

Metode analisis regresi data panel dipergunakan pada penelitian kuantitatif ini. Untuk menganalisis data panel perlu dilakukan serangkaian pengujian. Pertama, model terbaik ditentukan dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman. Kedua, apabila hasil Uji Chow dan Uji Hausman menunjukkan inkonsistensi, dilanjutkan dengan Uji Lagrange multiplier. Selanjutnya dilakukan Uji signifikansi simultan (F)

dan Uji Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengevaluasi kebaikan model. Selain itu, Dampak variabel independen terhadap variabel dependen juga ditentukan dengan menggunakan Uji Signifikansi Parsial (t). Terakhir, dilakukan Uji Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas untuk memenuhi Uji Asumsi klasik. Model persamaan data panel studi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log EDUC_{it} + \beta_2 \log HEALTH_{it} + \beta_3 \log INFJL_{it} + \beta_4 \log PDRB_{it} + \beta_5 UMK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Model persamaan data panel dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, Produk Domestik Regional Bruto, serta upah minimum kabupaten atau kota. Model ini menjelaskan bahwa setiap faktor tersebut diasumsikan memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan berperan dalam memperkuat produktivitas manusia, infrastruktur jalan membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar, PDRB menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah, sementara upah minimum mencerminkan kesejahteraan pekerja. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian berusaha mengukur secara kuantitatif seberapa besar kontribusi masing-masing faktor dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier adalah tiga uji paling umum dipergunakan dalam proses pemilihan model yang baik pada regresi data panel. Setiap uji memiliki metodologi dan tujuan yang berbeda, tetapi semuanya berkontribusi untuk menemukan model terbaik antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model terbaik dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian uji yang membandingkan beberapa pendekatan estimasi. Hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan rekomendasi antara uji yang digunakan, di mana Uji Chow mengarah pada penggunaan Fixed Effect Model, sedangkan Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier mengindikasikan bahwa Random Effect Model lebih sesuai. Dengan mempertimbangkan konsistensi hasil dari dua pengujian terakhir yang sama-sama merekomendasikan Random Effect Model, maka model estimasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Random Effect Model, karena dinilai lebih tepat dalam menggambarkan hubungan antarvariabel serta dapat mengakomodasi variasi individual dalam data secara lebih efisien.

Tabel 1. Hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier

Effects Test	Prob.	Hasil Uji
Uji Chow	0.0000	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	0.2596	<i>Random Effect Model</i>
Uji Lagrange Multiplier	0.0000	<i>Random Effect Model</i>

Sumber: Olah data dengan e-views (2025)

Tabel 1 hasil Uji Chow memperlihatkan nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$, yang mengartikan model terbaik ialah FEM. Selanjutnya, hasil dari pengujian Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas mencapai $0.2596 > 0.05$, artinya model terbaik adalah REM. Hasil dari Uji chow dan Uji hausman memperlihatkan inkonsistensi yang kemudian diperlukan rangkain uji berikutnya. Hasil Uji Langrange Multiplier memperlihatkan nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$, yang mengartikan model terbaik adalah REM. Model estimasi terbaik dapat diperoleh dengan mempergunakan REM, berdasarkan rekomendasi dari hasil Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier.

Hasil Estimasi

Hasil estimasi dengan menggunakan model Random Effect menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, PDRB, serta UMK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas F-Statistic yang lebih kecil dari tingkat signifikansi, sehingga hipotesis nol ditolak. Nilai R-Squared sebesar 0,5579 menggambarkan bahwa lebih dari setengah variasi IPM dapat dijelaskan oleh variabel-variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Namun, jika dilihat secara parsial, hanya variabel PDRB yang berpengaruh signifikan terhadap IPM, sementara variabel pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan UMK tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui PDRB memiliki peran yang lebih dominan dalam meningkatkan pembangunan manusia dibandingkan dengan variabel lain dalam penelitian ini.

Tabel 2. Data Panel Model REM

Variabel Dependen: IPM			
	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
(Constanta)	-2.559.863	-1.411.797	0.1683
Log(EDUC)	0.304484	0.701009	0.4887
Log(HEALTH)	-0.226895	-0.776903	0.4433
Log(INFJL)	-0.297925	-0.953101	0.3482
Log(PDRRB)	5.955.851	5.186.431	0.0000***
UMK	1.54E-06	0.946705	0.3514
<i>R-Squared</i>		0.557911	
<i>F-Statistic</i>		7.571.936	
<i>Prob(F-Statistic)</i>		0.000106	
N		36	

Catatan: *Signifikan pada level 10%; **Signifikan pada level 5%;
***Signifikan pada level 1%

Sumber: Olah data dengan e-views (2025)

Tabel 2 Hasil regresi model REM, menunjukkan nilai R squared sebesar 0,5579. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, PDRB, dan UMK sebesar 55,7% dapat menjelaskan variasi variabel dependen IPM, sedangkan sisanya 44,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nilai prob. F statistik $0,000106 < 0,05$, artinya variabel pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, PDRB serta UMK secara bersamaan berdampak pada IPM. Berdasarkan hasil estimasi model Random Effect dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di

bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, PDRB, dan UMK secara bersama-sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia, meskipun masih terdapat variabel lain di luar penelitian yang juga turut memengaruhi.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji multikolinieritas pada model regresi menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF yang masih berada dalam batas toleransi. Hal ini berarti antarvariabel independen tidak saling berkorelasi secara kuat, sehingga masing-masing variabel mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen tanpa menimbulkan bias. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan bebas dari permasalahan multikolinieritas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas (VIF)

Variabel	Centered VIF
C	NA
Log(EDUC)	1.924595
Log(HEALTH)	1.149120
Log(INFJL)	1.346352
Log(PDRB)	1.433737
UMK	1.844082

Sumber: Olah data dengan e-views (2025)

Berdasarkan Tabel 3 pengujian multikolinieritas menghasilkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk semua variabel independen masing-masing < 10 . Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pengujian multikolinieritas, hasil nilai VIF menunjukkan bahwa masalah multikolinieritas tidak ditemukan pada model regresi penelitian ini. Ketidadaan multikolinieritas pada model regresi juga memperkuat keandalan hasil estimasi, karena setiap variabel dapat diinterpretasikan sesuai dengan perannya masing-masing. Kondisi ini memberikan keyakinan bahwa model penelitian yang digunakan layak untuk dianalisis lebih lanjut dan hasilnya dapat diandalkan dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Obs*R-squared	1.053.039	Prob. Chi-Square(5)	0.0615

Sumber: Olah data dengan e-views (2025)

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas ditujukan untuk mengetahui apakah variabel dan residual berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Hasil Uji Glesjer menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran heteroskedastisitas dalam model regresi, dengan nilai probabilitas $0,0615 > 0,05$. Pada Tabel 2 variabel EDUC didapati nilai probabilitas sebesar $0,4887 > 0,05$, artinya variabel EDUC tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap IPM. Pada variabel HEALTH didapati nilai probabilitas sebesar $0,4433 > 0,05$, artinya variabel HEALTH tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap IPM. Pada variabel INFJL diperoleh nilai probabilitas $0,3482 > 0,05$, artinya variabel INFJL tidak memengaruhi secara

signifikan terhadap IPM. Pada variabel PDRB diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$, artinya variabel PDRB memengaruhi secara signifikan terhadap IPM. Pada variabel UMK diperoleh nilai probabilitas $0,3514 > 0,05$, artinya variabel UMK tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap IPM. Berdasarkan Tabel 2 hasil regresi model REM hanya variabel PDRB yang berpengaruh signifikan terhadap IPM. Nilai koefisien regresi variabel PDRB bernilai positif sebesar 5.9558, diartikan bahwa jika variabel PDRB naik satu persen maka variabel IPM naik 0,0595 basis poin.

3.2 Pembahasan

Berikut ini adalah penjelasan tentang hasil pengujian parsial, yang disajikan dalam Tabel 2, yang menunjukkan bagaimana variabel independen dan variabel dependen pada penelitian ini terdapat keterkaitan satu sama lain.

Pengaruh Pengeluaran Pendidikan terhadap IPM

Hasil dari uji hipotesis memperlihatkan bahwa variabel pengeluaran pendidikan tidak mempengaruhi IPM di Provinsi Papua. Hasil studi tersebut sejalan dengan penelitian Ismail et al., (2021); Susanti (2020); Arofah & Rohimah, (2019); dan Muliza et al., (2017) bahwasannya pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Meskipun ada upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, masih ada beberapa masalah yang harus ditangani. Kualitas pendidikan yang rendah adalah salah satu masalah utama, yang tercermin dalam kekurangan fasilitas dan sumber daya manusia (Oktania et al., 2024). Tantangan yang memengaruhi IPM di Provinsi Papua yaitu sektor pendidikan. Hal ini menunjukkan dana besar yang dialokasikan oleh pemerintah untuk Provinsi Papua dalam menunjang pendidikan kurang efektif untuk program yang dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Salah satu faktor penyebab dari kondisi tersebut adalah letak geografis Papua yang terpencil, dengan banyak daerah yang sulit diakses karena kekurangan infrastruktur, seperti jalan yang rusak, kurangnya transportasi sehingga membuat akses ke sekolah menjadi terbatas. Selain itu, dari sisi kebudayaan bahwa masyarakat memiliki tantangan dalam pengintegrasian kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan lokal dan kearifan budaya setempat.

Pengaruh Pengeluaran Kesehatan terhadap IPM

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwasannya variabel pengeluaran kesehatan tidak mempengaruhi IPM di Provinsi Papua. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Fahmi (2018) dan Aulia et al., (2023) yang menyatakan bahwa IPM tidak terpengaruh oleh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor kesehatan masih membutuhkan lebih banyak perhatian, terutama dalam hal pembelanjaan pemerintah daerah. Anggaran harus difokuskan pada belanja preventif (pencegahan) dari pada kuratif (penyembuhan) (Mongan, 2019). Sedangkan di Provinsi Papua, rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan menjadi penyebab utama terjadinya berbagai masalah yang mengganggu kualitas kesehatan masyarakat. Salah satu dampak langsung dari rendahnya pengeluaran kesehatan adalah kurangnya infrastruktur yang layak. Selain itu, kekurangan peralatan yang mendukung layanan kesehatan juga sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut membuat diagnosis dan penanganan penyakit menjadi sulit, sehingga resiko komplikasi dan kematian meningkat.

Pengaruh Pengeluaran Infrastruktur Jalan terhadap IPM

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa faktor pengeluaran infratsruktur jalan tidak berdampak pada IPM di Provinsi Papua. Hasil Penelitian tersebut sependapat dengan Susanti, (2020) bahwa variabel infrastruktur jalan tidak berpengaruh terhadap IPM, karena adanya masalah pembangunan seperti program yang salah sasaran sehingga terjadi ketidakmerataan pembangunann dan adanya kegagalan pasar dalam penyediaan barang publik. Kondisi infrastruktur jalan yang tidak memberikan dampak besar terhadap perkembangan ekonomi di wilayah tersebut mungkin disebabkan oleh pembangunan jalan yang masih belum mampu menghubungkan berbagai sektor ekonomi di daerah tersebut (Wardiningrum & SS, 2024). Keterbatasan infrastruktur jalan di Papua mencakup berbagai aspek, antara lain: kondisi fisik jalan yang buruk, kurangnya aksesibilitas ke daerah terpencil, dan minimnya jaringan transportasi yang memadai. Wilayah Papua yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit mempersulit pembangunan jalan yang efisien. Selain itu, banyak daerah di Papua masih mengalami keterisoliran, yang berdampak pada distribusi barang dan layanan publik yang krusial bagi masyarakat.

Pengaruh PDRB terhadap IPM

Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa variabel PDRB terdapat pengaruh signifikan serta positif terhadap IPM di Provinsi Papua. Artinya, PDRB berkontribusi terhadap pertumbuhan jumlah produksi di suatu daerah, serta mendorong peningkatan permintaan faktor produksi terutama tenaga kerja. Pendapatan masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan permintaan tenaga kerja, sehingga memberikan dampak yang baik pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, yang merupakan indikator penting dalam penilaian IPM. Temuan tersebut selaras dengan penelitian Nailufar et al., (2024); Siagian et al., (2024); Rifai 2022); Adam, (2021) dan Muliza et al., (2017). Pertumbuhan ekonomi yang pesat memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui kenaikan pendapatan per kapita. Namun, kondisi ini perlu diimbangi dengan pemerataan pendapatan. Tanpa adanya pemerataan yang efektif, maka keuntungan dari peningkatan pendapatan tidak akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Meningkatkan daya beli masyarakat berpengaruh pada peningkatan pendapatan per kapita dan pemerataan pendapatan. Dengan daya beli yang lebih tinggi, masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan mengakses lebih banyak barang dan layanan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, investasi yang berkelanjutan dan mengembangkan sektor ekonomi di Papua sangatlah penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan PDRB dapat berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu, pertumbuhan PDRB yang tinggi tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Namun, ada juga peneliti lain yang berbeda pendapat, seperti Handayani & Woyanti, (2021) yang menyatakan bahwa PDRB tidak mempengaruhi IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah secara signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa konsumsi masyarakat masih sebatas pemenuhan kebutuhan pokok.

Pengaruh UMK terhadap IPM

Hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa IPM di Provinsi Papua tidak terpengaruh oleh UMK. Hasil studi ini didukung oleh penelitian Kiha et al., (2021)

yang juga menyatakan bahwa IPM tidak dipengaruhi oleh UMK. Meskipun peningkatan upah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut tidak selalu berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat terutama ketika kenaikan upah disertai peningkatan harga kebutuhan pokok. Dalam konteks ini, ada kemungkinan bahwa masyarakat tidak merasakan perubahan yang signifikan dalam kualitas hidup mereka. Selain meningkatkan upah pemerintah juga harus mengendalikan inflasi agar harga kebutuhan pokok tetap stabil, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari peningkatan upah. Di sisi lain, temuan Jahang et al., (2024) memberikan perspektif yang berbeda, bahwa di Kabupaten Mimika, UMK mempunyai pengaruh yang signifikan kepada IPM. Hasil tersebut menunjukkan bahwa daya beli masyarakat dapat meningkat dengan upah yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut karena Kabupaten Mimika terdapat pusat industri pertambangan yaitu freeport, sedangkan di Kabupaten Mambero Raya, Waropen, Keerom, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Jayapura, Sarmi, Supiori, dan Kota Jayapura tidak terdapat pusat industri.

4. Kesimpulan

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, PDRB, dan UMK mempengaruhi IPM di semua Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua. Data panel digunakan dalam studi ini mencakup 9 Kabupaten dan Kota Provinsi Papua dengan observasi tahun 2020 hingga 2023. Hasil studi menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan UMK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Artinya tidak semua kebijakan fiskal memiliki dampak dalam meningkatkan IPM. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengutamakan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, variabel PDRB memiliki pengaruh signifikan pada IPM. Artinya kinerja pemerintah dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah menghasilkan capaian peningkatan pembangunan manusia. Dalam penelitian ini, salah satu kelemahan yang signifikan terletak pada daya ramal model yang hanya mencapai 55,7%. Angka tersebut menunjukkan adanya variabel tambahan yang tidak termasuk dalam model ini yang dapat memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Dengan daya ramal yang terbatas, hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang ada, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif yang mengeksplorasi variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi IPM. Adanya kelemahan penelitian yang telah dijelaskan tersebut dapat menjadi landasan untuk pengembangan studi berikutnya, di mana peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode analisis yang lebih mendalam untuk memasukkan variabel tambahan dan rentan waktu yang lebih lama. Hal tersebut diharapkan akan meningkatkan akurasi dan relevansi hasil studi di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Abdilah, F., & Suliswanto, M. S. W. (2021). jm_jie,+738-750+Pengaruh+Pengeluaran+Kesehatan,+Dana+Perimbangan,+Dan+Penduduk+Miskin+Terhadap+Indeks+Pembangunan+Manusia+Di+Provin. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(4), 738–750.

- Adam, R. (2021). *Analisis Pengaruh Pdrb, Belanja Modal, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada 34 Provinsi Di Indonesia Tahun*.
- Agustin, M. W., & Anto, Moh. B. H. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Negara ASEAN Periode 2015-2020*.
- Arifin, A. S. (2023). Human Capital Investment: Meningkatkan Daya Saing Global Melalui Investasi Pendidikan. *Jurnal Education And Development*, 11(2), 174–179. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4672>
- Arofah, I., & Rohimah, S. (2019). pendidikan kesehatn tidak signifikan. *Jurnal Saintika UNPAM*, 2(1), 76–87.
- Aulia, G. R. N., Daeng, A., & Fatimah, S. (2023). pengaruh pengeluaran pemerintah di mataram. *Urnal Oportunitas EKonomi Pembangunan*, 2(2), 71–81.
- Bakar, A. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 4(2), 16–39.
- Batubara, N. (2023). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 6 Negara ASEAN Tahun 2000 – 2021*.
- Dendy Indramawan, Antonius Beni Handayanto, & Atik Djajanti. (2021). Pentingnya Opini Audit sebagai Pemediasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 209–218. <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i2.007>
- Fahmi, A. H. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Thdp Ipm Di Papua THN 2011-2015. *Universitas Islam Indonesia*.
- Handayani, S., & Woyanti, N. (2021). pdrb tidak signifikan thdp ipm. *BISECE(Business Economic Entrepreneurship)*, 4(2), 17–16.
- Harahap, D. A. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*.
- Harsono, I., Purnama, I., Firmansyah, M., Irwan, M., & Sutanto, H. (2024). The Influence Of Education Expenditure, Health Expenditure And Social Assistance Expenditure On Human Development Index In NTB Province In 2013-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 802–810. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Imelda, R., Balafif, M., & Wahyuni, S. T. (2021). Pengaruh Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo Tahun 1998-2017. *Bharanomics*, 1(2), 67–74. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i2.155>
- Imron, C. (2018). *pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pendidikan, kesehatn dan infrastrukur thdp ipm di jawa timur*.
- Ismail, I. F., Walewangko, E. N., & Sumual, J. I. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Manado. *Jurnal Berkaala Ilmiah Efisien*, 21(3), 103–114.

- Ismanti, K. (2017). *Pengaruh Faktor Pendidikan, Konsumsi Protein, Konsumsi Kalori, Dan Upah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Bangsa Indonesia* (Vol. 9, Issue 1). http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid
- Jahang, P. A., Wenehan, F. Y. A., Rara, A. T., & Manduapessy, R. L. (2024). Analysis Of The Influence Of Pad, Government Expenditure, And Mses On Hdi In Mimika District. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 9005–9013.
- Kiha, E. K., Seran, S., & Seuk, G. (2021). The Effect Of Inflation, Gross Domestic Products And Regional Minimum Wage On Human Development Index Province Of East Nusa Tenggara Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto Dan Upah Minimum Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 41–56. <http://journal.al-matani.com/index.php/invest/index>
- Komang, J. W., & Ida, A. M. P. (2024). Pengaruh PDRB dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan dan IPM di Provinsi-Provinsi Indonesia. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 20(3), 198–224. <https://doi.org/10.56910/gemawisata.v20i3.405>
- Larasati, D. (2018). *Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zis, Pdrb Per Kapita, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia Tahun 2013-2016*.
- Listianingsih, R., Gunawan, A., & Arwani, A. (2022). pengeluaran pemerintah jateng tahun 2016-2018. *Jurnal Sahmiyya*, 1(2), 63–74.
- Maryozi, Z., Isyandi, B., & Aulia, A. F. (2022). jurnal_acuanpengaruh pengeluaran pemerintah kesehatan, pendidikan, infrastruktur jln thdp ipm di prov riau. *Jurnal Niara*, 15(1), 1–11.
- Maulina, U., & Andriyani, D. (2020). pengaruh pengeluaran pndidikan dan kesehatan tpak thdp ipm di indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 11(1), 28–37.
- Mongan, J. J. S. (2019). kesehatan tidak signifikan . *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176.
- Muliza, Zulham, T., & Seftarita, C. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan Pdrb Terhadap Ipm Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 51–69. www.bps.go.id
- Naibaho, M., & Nabila, U. (2021). Gamma-Pi: Jurnal Matematika dan Terapan Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Langkat. *Jurnal Gamma-Pi*, 3(2).
- Nailufar, F., Juliansyah, H., Murtala, & Risna. (2024). 17760-45838-1-SM. *JURNAL EKONOMI REGIONAL UNIMAL*, 7(1), 11–22.
- Putra, W. (2017). Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Perbatasan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(2), 120–138.
- Rahim, A. ; S. M. A. P. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pendidikan, Kesehatan Thdp Ipm Di Sumbawa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (Pusat Riset Dan Publikasi Fakultas Ekonomi & Manjamen Universitas Samawa)*, 9(3), 276–284.

- Rifai, A. (2022). *Analisis Pengaruh Upah Minimum, Penanaman Modal Asing Dan Pdrb Sektor Industri Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Atau Kota Di Pulau Jawa Tahun 2018-2020 Disusun sebagai salah syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada.s*
- Siagian, Y., Hidayat, N., Gultom, G. A. M., Belcha, D., & Sipahutar, J. N. (2024). IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau Tahun 2010-2022. *Yeremi Siagian*, 2(2). www.bps.go.id.
- Sidabutar, S., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Sanniana+Sidabutar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 86–101.
- Si'lang, I. L. S., Hasid, Z., & Priyagus. (2019). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. *Jurnal Manajemen*, 11(2), 159–169. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JURNALMANAJEMEN>
- Sitompul, M. H., Tarigan, A. A., & Nasution, , Muhammad Syukri Albani. (2024). INTEGRASI PREFERENSI MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM): PERSPEKTIF SURAT AR RA'D AYAT 11. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 9(1), 374–388. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i1.21466>
- Suhedi, & Astuti, I. P. (2023). ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, PDRB DAN PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP IPM DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2017-2022. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7(2), 1676–1694.
- Susanti, E.; H. N. (2020). acuan jurnal pengaruh pengeluaran pemerintah kesehatan, pendidikan dan infrastruktur thdp ipm kalimaantaan timur garis merah. *ECO-BUILD JOURNAL*, 4, 25–34.
- Thazafi, M. R. (2022). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. In *uIN AR-Raniry*.
- Vitona, D., Erfiani, Indahwati, Fitrianto, A., & Aliu, M. A. (2024). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL REGRESI LOGISTIK BINER. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika Dan Statistik*, 5(2). <https://doi.org/10.46306/lb.v5i2>
- Wardiningrum, B. P., & SS, V. D. (2024). Analisis Pengaruh Inflasi, Tenaga Kerja, Ipm, Dan Infrastruktur Jalan Terhadap Perekonomian Papua. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(1), 29–43. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.1.3>
- Wulandari, I. A. (2022). pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap ipm provinsi kalimantan barat 2010-2019. *Universitas Islam Indonesia*.
- Zarkasi, R. N., Sifriyani, & Prangga, S. (2021). Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kalimantan Menggunakan Regresi Panel. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 15(2), 277–282. <https://doi.org/10.30598/barekengvol15iss2pp277-282>